Jurnal Dinamika Hukum
Vol. 13 No. 2 Mei 2013

Berkaca pada Cermin Retak

Menjelang pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif di tingkat DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi, dan DPRD Pusat, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, suhu politik di tanah air semaking panas. Bara api dari panasnya suhu politik telah disulut oleh beberapa hal. *Pertama*, banyaknya anggota legislatif dari berbagai partai terlibat dalam tindak pidana korupsi. Keterlibatan mereka tidak hanya berimbas pada persoalan hukum semata, akan tetapi telah merambah lebih luas ke ranah politik, bahkan menjadi komoditas politik. Ada upaya tersangkutnya anggota legislatif sekaligus anggota partai politik ini sebagai bagian dari penggembosan partai yang berakibat lebih jauh adalah penurunan elektabilitas partai maupun tokoh dari partai politik tersebut.

Kedua, ada upaya untuk menggali dana bagi kepentingan partai yang bersiap menghadapi pemilu dengan memberdayakan anggota partai yang duduk pada jabatan-jabatan eksekutif. Kecenderungan ini terungkap dari membengkaknya APBN untuk kegiatan sosial maupun skenario tender pengadaan barang dengan memenangkan pihak yang dapat memberi fee lebih banyak, terutama kepada partai. Ini terungkap dari perihal pertama di atas, yang nyata-nyata melibatkan anggota legislatif, pejabat eksekutif, maupun perantara dan penyuapnya. Dengan kata lain penggalian atau pengumpulan dana oleh partai politik untuk kegiatan politiknya, tak dilakukan secara elegan.

Ketiga, media tidak lagi independen sebagaimana tuntutan mereka tentang kebebasan pers. Penafsiran lebih luas tentang kebebasan pers juga bisa berarti kebebasan untuk berpihak pada partai atau tokoh partai politik tertentu, sehingga siapa penguasa media, maka dialah yang akan sering muncul untuk mengiklankan dirinya pada media tersebut. Media yang seharusnya menjadi sarana untuk pendidikan politik, malah menjadi bara yang menyulut emosi dan sentiment politik.

Berkebalikan dengan kenyataan di atas, rakyat tampak adem ayem saja. Daftar calon anggota legislatif yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik pusat maupun daerah ditanggapi dengan dingin. Justru lembaga survey, pengamat politik dan LSM yang rajin berkomentar di televisi. Hal ini menunjukkan pada dua hal. *Pertama*, masyarakat sudah tidak lagi peduli dengan proses demokrasi yang nyatanya menghabiskan banyak biaya dengan meninggalkan bara dalam masyarakat. Hal ini terbukti dengan berbagai peristiwa konflik dan kekerasan usai pilkada maupun yang dibawa ke arena hukum melalui Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, masyarakat juga sudah bosan dengan janji-janji politisi yang pada akhirnya menjadikan rakyat sebagai tumbal politik. Ibarat pepatah, habis manis sepah dibuang atau kau yang berjanji kau yang mengingkari, seperti syair lagu dangdut dari Rhoma Irama.

Pemilu yang damai dambaan setiap orang maupun negara. Beberapa pemilu atau pilkada yang membawa korban ataupun membawa permasalahan ke ranah hukum, tentu bukan contoh yang baik. Ini bukan berarti membawa ke ranah hukum atas permasalahan yang timbul dalam pilkada tidak baik, akan tetapi banyak calon yang kalah terkadang terlalu mencari-cari masalah dengan mengajukan gugatan ke MK. Tampaknya jiwa untuk menerima kekalahan belum bertumbuh pada diri calon kepala daerah/anggota legislatif, ini terjadi karena banyak di antara calon kepala daerah/anggota legislatif terlalu tergila-gila dengan jabatan, sehingga takut untuk kalah. Hal ini seharusnya tidak berimbas ke calon anggota legislatif mendatang.

Purwokerto, Mei 2013
Ketua Penyunting

Agus Raharjo

DAFTAR ISI

Berkaca pada Cermin Retak..... i

Daftar isi..... ii

Implikasi Tindak Pidana di Luar KUHP dalam Hukum Acara Pidana(Studi Kasus Taraf Sinkronisasi) 179
Sulistyanta

Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Masyarakat Dayak Kanayatn (Kajian Perbandingan terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak) 197
Sri Ismawati

Kebijakan Remunerasi Pegawai Negeri Sipil (Analisis Materi Muatan Penentuan Nilai dan Kelas Jabatan dalam Pemberian Remunerasi) 210
Nayla Alawiya, Aryuni Yuliantiningsih, Tedi Sudrajat dan Dessi Perdani Yuris Puspita Sari

Kajian Perbuatan Melawan Hukum terhadap Wewenang Pelayanan Bidan Praktik Mandiri di Kabupaten Banyumas 217
Diah Arimbi

Jaminan Sosial Kesehatan: Integrasi Program Jaminan Kesehatan Aceh dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional 229
Mujibussalim, Sanusi, dan Fikri

Perlindungan HAM Buruh Migran Tak Berdokumen Berdasarkan Hukum Perdagangan dan Hukum HAM Internasional 245
Sefriani

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 terhadap Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah 257
Arief Suryono, Rahmad Santosa, dan Haryadi

Konflik Penguasaan Tanah di Maluku Utara: Rakyat Versus Penguasa dan Pengusaha 266
Husen Alting

Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan oleh Pihak Ketiga 283
Urip Santoso

Hermeneutika Hukum sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum bagi Hakim untuk Menunjang Keadilan Gender 293
Alef Musyahadah R

Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis 307
Zulfadli Barus

Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia 319
Lastuti Abubakar

Euthanasia sebagai Konsekuensi Kebutuhan Sains dan Teknologi (Suatu Kajian Hukum Islam) 332
Arifin Rada

Arti Pentingnya Keterangan DPR dan Presiden dalam Proses Uji Materi Undang-Undang 344
Retno Mawarini Sukmariningsih

Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum di Timor Timur Pasca Jajak Pendapat 345
Satrio Saptohadi

Indeks iii